

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 1	HALAMAN: 37-48	ISSN:2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
---------------------------	-----------	----------	----------------	---

## **MEMETAKAN TOKOH MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN CSR PARTISIPATIF**

Santoso Tri Raharjo<sup>1</sup>, Sahadi Humaedi<sup>2</sup>, Budhi Wibhawa<sup>3</sup>, Nurliana Cipta Apsari<sup>4</sup>

1. Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pengembangan Masyarakat, FISIP Universitas Padjadjaran  
*santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id*
2. Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pengembangan Masyarakat, FISIP Universitas Padjadjaran  
*sahadi.humaedi@unpad.ac.id*
3. Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pengembangan Masyarakat, FISIP Universitas Padjadjaran  
*budhi.whibawa@unpad.ac.id*
4. Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pengembangan Masyarakat, FISIP Universitas Padjadjaran  
*nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id*

### **ABSTRAK**

Implementasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) atau corporate social responsibility (CSR) pada masyarakat seringkali keberhasilannya sangat ditentukan oleh para pemangku kepentingan, selain masyarakat itu sendiri. Namun pada suatu masyarakat dengan karakteristik tertentu, keberadaan tokoh masyarakat (*local leader*) baik formal maupun informal masih sangat menentukan gerak dan arah kegiatan perubahan masyarakatnya, khususnya untuk keberhasilan kegiatan CSR. Pihak perusahaan dalam merancang kegiatan CSR perlu melibatkan masyarakat dari sejak awal, khususnya dalam melakukan pemetaan sosial (*social mapping*) dan seterusnya pada tahap pelaksanaan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan mengidentifikasi dan memetakan para tokoh juga melibatkan masyarakat, sebab masyarakatlah yang paling merasakan kehadiran peran serta para tokohnya. Pihak perusahaan, khususnya pada perusahaan dengan jenis industri ekstraktif, harus benar-benar memahami keberadaan para tokoh masyarakat, jenis-jenis tokoh masyarakat, serta peran sertanya dalam kegiatan pengembangan masyarakat terkait dengan CSR. Oleh karena itu, pada-perusahaan diperlukan sumber daya manusia yang benar-benar mengetahui dan memahami tentang proses dan metode pengembangan masyarakat (*community development*) atau yang benar-benar paham mengenai konsep dan pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sehingga kegiatan pengembangan masyarakat atau juga CSR yang sarat dengan pelibatan masyarakat (*partisipatif*) dapat menjaga kemandirian, keberdayaan (*empowered*) serta kesinambungan (*sustainability*) suatu program. Pada akhirnya akan tercipta relasi yang harmonis antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah operasi kegiatan perusahaan.

Kata kunci; TJSP, tokoh masyarakat, pengembangan masyarakat, pemetaan sosial

### **ABSTRACT**

*The implementation of corporate social responsibility (CSR) activities in corporate communities is often determined by the stakeholders, as well as the local community itself. In a society with certain characteristics, the existence of formal and informal local leaders still very much determines the movement and direction of the changing activities of the community, especially for the success of CSR activities. The company in designing CSR activities needs to involve the community from the beginning, especially in conducting social mapping and so on at the implementation stage, as well as ongoing monitoring and evaluation activities. The activity of identifying and mapping leaders also involves the community, because it is the people who feel the presence of their leaders the most. The company, especially for companies with extractive industries, must really understand the existence of community leaders, the types of community leaders, and their participation in community development activities related to CSR. Therefore, the company requires human resources or staff who really know and*

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 1	HALAMAN: 37-48	ISSN:2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
---------------------------	-----------	----------	----------------	---

*understand about community development processes and methods (community development) or who truly understand the concept and approach of corporate social responsibility. So that community development activities or CSR that are full of community involvement (participatory) can maintain independence, empowerment and sustainability of a program. In the end, a harmonious relationship will be created between the company and the community around the area where the company operates.*

*Keywords; CSR, local leader, community development, social mapping*

## PENDAHULUAN

Tujuan riset ini adalah mengidentifikasi atau memetakan tokoh-tokoh yang dapat mempengaruhi proses kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) atau *corporate social responsibility* (CSR), khususnya pada perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya alam atau industri ekstraktif. Patut ditengarai bahwa salah satu penyebab in-efektifitas dan in-efisiensi kegiatan CSR pada perusahaan ekstraktif (pertambangan) adalah kegagalan memetakan dan melibatkan para tokoh masyarakat dalam kegiatan mereka. Sebagaimana dikemukakan pula oleh Frynas, 2009) bahwa perusahaan pertambangan umumnya gagal melakukan konsultasi secara lebih luas kepada pimpinan lokal dan tokoh-tokoh lokal. Demikian pula, minimnya partisipasi atau peran serta masyarakat lokal yang bahkan hampir sama sekali tidak ada, yang pada akhirnya memperlemah kegiatan CSR dan pemeliharannya.

Kegagalan dalam melibatkan masyarakat setempat atau orang-orang lokal dalam kegiatan CSR ditengarai dapat memelihara mental yang berdampak lebih buruk lagi bagi masyarakat lokal, yaitu memelihara mentalitas ketergantungan (*dependency mentality*) (Frynas, 2009; Raharjo, 2013). Program CSR yang ditujukan pemberdayaan masyarakat lokal, hasilnya menjadi kontra-produktif, hasilnya malah menciptakan masyarakat tergantung. Fenomena permasalahan yang muncul tersebut sebetulnya dapat dihindari dengan melakukan dialog mendalam mendalam serta membangun inisiatif masyarakat lokal berperan serta dengan memanfaatkan pengetahuan, keterampilan-keterampilan dan metode-teknik. Namun sayangnya, keterlibatan masyarakat lokal tersebut seringkali terganjal disebabkan perusahaan tidak memiliki atau

kekurangan sumber daya manusia perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang CSR atau pengembangan masyarakat. (Frynas, 2009; Raharjo, 2013).

Kondisi masyarakat Indonesia yang umumnya 'guyub' serta 'patron-klien' sedikit banyak dipengaruhi oleh pola kepemimpinan tokoh masyarakatnya. Masyarakat akan melihat arah gerak tokoh-tokoh mereka di lingkungannya. Demikian pula pada sebagian besar wilayah di Indonesia, khususnya masyarakat yang berada di *remote area*, mereka masih mendengarkan para tokohnya (pemimpin). Dalam setiap masyarakat selalu terdapat tokoh penggerak yang ditampilkan dalam bentuk kelembagaan kepemimpinan (*leadership*). Setidaknya terdapat tiga bentuk kepemimpinan: (a) pemimpin formal atau *umaroh*; (b) pemimpin keagamaan atau *ulama*; dan (c) pemimpin budaya. Seorang tokoh kepemimpinan (*leadership*) desa, baik ia seorang tokoh formal (aparatur pemerintah) maupun tokoh pemimpin informal (tokoh agama, budaya, pedagang sukses, dll.) disebut *kokolot* atau *olot*. ... (Suradisatra, *et al.*, 2009). Tanto (2012), mengatakan bahwa tokoh masyarakat adalah orang yang terkemuka dan kenamaan dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Dengan demikian ketokohan seseorang dalam suatu masyarakat terbatas oleh ruang dan waktu, artinya pada tempat dan waktu yang berbeda ketokohan tersebut belum tentu sama. Keberadaan tokoh masyarakat berfungsi untuk memobilisasi anggota masyarakatnya untuk tujuan tertentu. Kartodirdjo (2007) menyatakan bahwa pemimpin lokal dengan otoritas tradisionalnya mempunyai pengaruh yang efektif dalam pelaksanaan berbagai macam program pembangunan. Tidak terkecuali puladengan program CSR suatu perusahaan

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 1	HALAMAN: 37-48	ISSN:2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
---------------------------	-----------	----------	----------------	---

yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi masyarakat seputar wilayah kerjanya.

Pemetaan tokoh masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari *social mapping* dalam kegiatan CSR yang harus dilakukan secara hati-hati, serta merupakan langkah awal dalam proses pengembangan masyarakat. Sehingga tulisan ini menjadi *urgent* terutama dalam kerangka menjawab dan memperkuat pentingnya pemetaan tokoh masyarakat dalam kerangka pengembangan masyarakat CSR.

## METODE

Pendekatan kualitatif dengan teknik *participatory rural appraisal* (PRA), dan wawancara mendalam dan observasi dilakukan pada warga masyarakat yang berada di lingkungan industri ekstraktif, khususnya pada perusahaan jasa pembangkitan listrik yaitu PT. Indonesia Power Drajat-Kamojang. Selain pihak CSR PT.Indonesia Power, wawancara juga dilakukan kepada sejumlah tokoh, baik formal (perangkat desa dan kecamatan) dan tokoh informal (agama, adat) dari enam desa di sekitar industri ekstraktif.

## PEMBAHASAN

### Kepedulian Sosial Perusahaan

Kepedulian perusahaan atau industri ekstraktif (yang umumnya berada di *remote area*) melalui kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan (TJSP) atau CSR kepada masyarakat sekitar atau lokal, sudah seharusnya dan sangatlah wajar ditujukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat sekitar. Ujud CSR dalam kerangka memperbaiki kondisi masyarakat tersebut dapat didekati melalui upaya pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Hal ini dinyatakan oleh Bryant dan White (1987), bahwa pemberdayaan dapat menumbuhkan kekuatan (*strength*) yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Sebagaimana dimaklumi bahwa terdapat tiga jenis program CSR (Budimanta, Prasetyo & Rudito, 2004) 1995) berdasarkan kegiatan dan tujuannya, yaitu *community assistant*, *community relation* dan *community empowerment*. Ketiga jenis atau pola CSR tersebut dalam penerapannya bergantung pada kondisi lingkungan internal perusahaan

(staf, visi, sumber daya) dan lingkungan eksternal (lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan politik) dari perusahaan tersebut. Pada lingkungan eksternal perusahaan, yaitu kondisi di luar perusahaan, Implementasi program CSR kepada masyarakat seringkali ditentukan oleh keberadaan dan daya memobilisasi tokoh masyarakat. Merekalah para tokoh masyarakat yang bertindak sebagai pemimpin lokal, baik formal maupun informal yang mempengaruhi gerak dan langkah mobilitas masyarakatnya. Awang (2004) menyatakan bahwa pemimpin lokal pada hakekatnya berpotensi sebagai agen pembangunan.

Kartodirdjo (2007) mengemukakan bahwa pemimpin lokal dengan otoritas tradisionalnya mempunyai pengaruh yang efektif dalam pelaksanaan berbagai macam program pembangunan. dalam kerangka CSR, kemampuan pihak perusahaan dalam memetakan tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun program CSR yang efektif, efisien dan partisipatif menjadi *urgent*. Para pemimpin lokal di masyarakat, umumnya juga adalah para tokoh masyarakatnya. Pihak perusahaan dapat mendayagunakan tokoh-tokoh masyarakat tersebut untuk pemberdayaan masyarakatnya.

Selain sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap keberadaan para tokoh masyarakat tersebut, pendayagunaan tokoh masyarakat juga berfungsi membangun komunikasi yang harmonis dengan masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, para tokoh masyarakat dapat menjembatani hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat (lokal) menjadi lebih harmonis. Program-program CSR dapat menjadi wadah atau media untuk membangun relasi, melalui para tokoh masyarakatnya, antara masyarakat dengan perusahaan. Relasi antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang harmonis dapat menjadi *milestones* yang mendasar tahapan kegiatan bersama berikutnya (Raharjo, 2015).

Setidaknya terdapat sejumlah hal positif manakala proses pengembangan masyarakat dalam rangka implementasi program CSR suatu perusahaan dilakukan dengan membangun kontak dan komunikasi yang harmonis terlebih dahulu (Raharjo, 2015), sebab hal tersebut berarti dapat membuat:

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 1	HALAMAN: 37-48	ISSN:2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
---------------------------	-----------	----------	----------------	---

- Masyarakat merasa dihargai dan dihormati;
- Membangun dan terbangun semangat saling percaya antara masyarakat dengan perusahaan;
- Mencegah timbulnya salah informasi dan kesalahpahaman diantara perusahaan dan masyarakat;
- Terbangun rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap kegiatan/ program yang dibangun dan dikembangkan bersama; dan
- Menjamin keberlanjutan program di masa mendatang

Tokoh masyarakat sebagai pemimpin lokal memiliki peran penting dalam membangun gagasan yang muncul dari masyarakat setempat, berkaitan dengan kegiatan CSR. Dalam konteks pemetaan Sebelum membahas lebih jauh mengenai bagaimana melakukan pemetaan tokoh di perdesaan dalam rangka kegiatan CSR, pada sub bab berikut akan dikemukakan beberapa pengertian mengenai pemimpin lokal, kepemimpinan lokal, dan peranan pemimpin lokal.

### **Pemimpin, Kepemimpinan & Tokoh Masyarakat (Pemimpin Lokal)**

Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2002), merupakan faktor dinamis dari status. Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status tertentu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki status atau posisi. Setiap orang merupakan bagian dari sebuah sistem sosial. Artinya setiap orang dalam suatu sistem sosial memiliki posisi, yang mana setiap posisi yang ditempatinya memiliki fungsi beragam dan berbeda satu dengan lainnya. Beragam fungsi tersebut membentuk suatu perilaku yang mewakili status atau posisi seseorang. Dengan demikian peran merupakan apa-apa yang seharusnya dilakukan dan apa-apa yang diharapkan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang berada dalam suatu sistem sosial yang sama. Peranan seseorang ditentukan oleh kedudukan sosial atau status dalam masyarakatnya. Semakin tinggi status seseorang, maka semakin besar peranannya dalam masyarakat (Siwalette 2005).

Margono et al. (2014) mengemukakan bahwa peran memiliki empat makna atau arti yaitu:

- a. Aspek dinamis dan kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c. Perilaku aktual yang diperankan oleh seseorang
- d. Bagian aktivitas yang diperankan oleh seseorang.

Berdasarkan empat makna tersebut, setiap peran akan selalu berkaitan dengan norma serta nilai berkenaan dengan posisi atau status seseorang dalam masyarakatnya. Posisi seseorang di masyarakat memang terikat dengan beragam peraturan yang merupakan koridor dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga peran merupakan konsep yang berkaitan dengan apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam suatu sistem sosial atau kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian perilaku individu atau *agent* (Gidden, 2010) juga merupakan bagian penting dalam pembentukan struktur sosial.

Kepemimpinan menurut Hemhill dan Coon (1957) adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktifitas-aktifitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama (*shared goal*). Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberi komando (*the capacity to lead others*) juga dapat bermakna sebagai perilaku memberi arahan (*an actor or instance of guiding*) yang sama artinya atau sinonim dengan *direction*, *guidance*, dan *management* (Syahyuti 2006). Di dalam konsep kepemimpinan, muncul yang disebut dengan pemimpin. Menurut Antlov (2003), pemimpin adalah seseorang yang memiliki akses terhadap pengetahuan, sumberdaya-sumberdaya, dan atau mandat untuk memerintah orang lain. Pemimpin adalah seseorang yang diteladani oleh pengikutnya. Etzioni (1985) kembali membedakan pemimpin lokal menjadi dua golongan yakni pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal adalah pemimpin yang hanya memiliki kekuasaan dan legitimasi yang sah sebagai sumber dari jabatan yang diperolehnya dalam organisasi dan pengaruh pribadi. Sedangkan pemimpin informal adalah

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 1	HALAMAN: 37-48	ISSN:2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
---------------------------	-----------	----------	----------------	---

pemimpin yang hanya memiliki kekuasaan dari pengaruh pribadi, tidak memiliki jabatan yang bersumber dari legitimasi dan tidak dibebani dengan tugas serta tanggungjawab yang jelas.

Tokoh masyarakat memiliki peranan yang sangat erat pengaruhnya dengan pengembangan potensi di suatu daerah. Efektivitas tokoh masyarakat sebagai pemimpin dapat dilihat dari sejauh mana ketokohnya mempengaruhi perubahan di suatu daerah. Kepemimpinan atau ketokohan seseorang berguna dalam upaya memobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Kemampuan tokoh masyarakat dalam mengajak, membimbing, dan memotivasi warga dalam berbagai aktivitas bersama di perdesaan adalah kemampuan utama yang harus dimiliki (Urpon 2015). Setidaknya terdapat tiga peran utama tokoh masyarakat dalam kepemimpinannya yaitu sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator. Lebih jauh Mahayana (2013) menjelaskan bahwa ketiga peran tokoh masyarakat tersebut sebagai berikut:

- a. *Motivator*, peran ini berfungsi sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat agar masyarakat bergairah dan penuh *energy* dalam melakukan aktifitas dan kegiatan bersama yang bermanfaat bagi lingkungan sosialnya
- b. *Fasilitator*, para tokoh masyarakat sebagai pemimpin lokal dapat mempermudah sesuatu hal sulit, sehingga memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dalam peran ini tokoh masyarakat dapat narasumber dan mitra diskusi, sehingga fungsi katalisator juga terjadi dalam peran ini. Dalam pengembangan hubungan antara pihak industri dengan masyarakat lokal, maka tokoh masyarakat yang juga pemimpin lokal dapat menjembatani komunikasi antara keduanya. Selain itu pemimpin lokal juga dapat memungkinkan kegiatan-kegiatan pembangunan desa sehingga prosesnya menjadi berjalan mudah dan lancar.
- c. *Mobilisator*, yaitu peran tokoh masyarakat sebagai pemimpin lokal yang dengan pengaruh yang dimilikinya dapat sangat potensial dalam menggerakkan para

anggota masyarakat untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berkenaan dengan kepemimpinan Raharjo (2015) menyatakan bahwa gagasan Ki Hajar Dewantoro yang mengemukakan tentang konsep kepemimpinan masih sangat relevan dikemukakan di era kekinian, yaitu dengan ungkapan *ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani*, yang artinya

- a. *Ing ngarso sung tulodo*, mengandung makna bahwa setiap orang adalah pemimpin, yang kalau berada di depan harus mampu memberikan contoh yang baik, suri tauladan kepada bagi anak buahnya, kata kuncinya adalah memberi teladan.
- b. *Ing madya mangun karsa*, apabila berada di tengah maka pemimpin harus mampu membangkitkan motivasi dan inovasi, karya-karya nyata yang dapat membangkit semangat kebangsaan.
- c. *Tut wuri handayani*. Ketika berada di belakang, maka berilah dukungan baik moral dan material dari belakang, sehingga tercipta peluang-peluang yang memudahkan bawahan atau generasi penerus bangsa untuk siap menerima estafet kepemimpinan.

Ketiga model kepemimpinan tersebut bukanlah masing-masing bagian yang saling terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh, saling terkait, dan menguatkan; khususnya berkaitan dengan sikap dan karakter. Setiap orang atau pemimpin dapat saja berada di posisi manapun; suatu saat dia dapat berada di depan, di tengah atau pun di belakang. Berbicara kepemimpinan bukan persoalan posisi, tetapi bagaimana potensi atau pengaruh yang dimilikinya dapat menggerakkan orang atau pihak lain ke arah yang lebih baik. Demikian pula halnya pada para tokoh masyarakat sebagai pemimpin di perdesaan. Umumnya pemimpin di perdesaan lebih banyak merupakan para pemimpin informal, dengan latar belakang masing-masing. Menurut Liow et al.(2015) pemimpin informal di masyarakat setidaknya memiliki dua peran utama, yakni sebagai motivator dan mediator (penghubung).

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 1	HALAMAN: 37-48	ISSN:2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
---------------------------	-----------	----------	----------------	---

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa peran motivator terutama adalah memberikan motivasi atau mendorong serta juga menyemangati orang-orang atau warga masyarakatnya menuju perubahan yang lebih baik. Umumnya tindakan *persuasive* yang dilakukan tokoh masyarakat atau pemimpin informal adalah dengan memberikan nasihat atau wejangan agar dapat terlibat aktif dalam pembangunan atau pengembangan desanya. Sedangkan peran informal berikutnya sebagai mediator, yaitu sebagai penghubung atau mengkomunikasikan berbagai kebijakan atau program yang ditujukan bagi desanya agar dapat diterima oleh masyarakat.

Terdapat peran penting berikutnya yang dimiliki oleh tokoh masyarakat atau pemimpin lokal, sebagaimana dikemukakan oleh Yanti (2004), yaitu melegitimasi program-program yang memang bermanfaat bagi masyarakatnya. Pentingnya peran legitimator bagi pemimpin lokal khususnya dalam memperlancar program-program atau kebijakan-kebijakan yang menyentuh masyarakatnya. Tentu saja peran melegitimasi kebijakan, program dan kegiatan dalam suatu masyarakat berkaitan pula dengan sistem sosial dan budaya di perdesaan umumnya masih terikat tata nilai bersama.

Kedudukan tokoh masyarakat dalam tata nilai sebagai tokoh utama menjadi sangat penting, karena ia seringkali menduduki posisi yang tertinggi dalam tatanan nilai tersebut. Tindakan dan perilaku, serta perkataan tokoh masyarakat di perdesaan umumnya menjadi teladan bagi para anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Suatu rancangan program atau kegiatan yang telah lama direncanakan untuk dilaksanakan, bisa jadi gagal karena tidak mengajak serta para tokoh masyarakat atau tidak memperoleh pengakuan (legitimasi) dari para tokohnya. Tokoh-tokoh di dalam masyarakat, dapat dibedakan berdasarkan keahlian tertentu di masyarakat. Misalnya ada tokoh masyarakat di bidang pertanian, kehutanan, kepemudaan, agama, adat istiadat, ibu-ibu, dan seterusnya; hal itu bergantung pada kondisi dan karakteristik perdesaan. Desa pertanian para tokohnya akan berbeda dengan desa nelayan. Karakteristik

demografi akan mencirikan juga tokoh-tokoh yang muncul di masyarakatnya.

### **Pemetaan Tokoh Masyarakat**

Tokoh masyarakat perlu dipetakan dengan jelas dan hati-hati. Sebab masing-masing tokoh masyarakat umumnya mewakili kelompok atau golongan tertentu di masyarakat. Seseorang tokoh masyarakat memperoleh pengakuan ketokohan sehingga menjadi pemimpin kelompoknya dapat diperoleh dengan beragam cara. Setidaknya terdapat dua cara dalam memperoleh status di masyarakat yaitu *achieved* dan *ascribed* (Soekanto, 1985). Namun demikian belum tentu status yang diperoleh atau yang disandang oleh seorang tokoh masyarakat itu benar-benar *legitimated* di masyarakatnya. Pengakuan tersebut amatlah penting, karena berkaitan dengan potensi untuk melakukan atau menggerakkan sesuatu bagi anggotanya, yang mana hal ini disesuaikan dengan tipologi kelompok yang dipimpin untuk mendinamiskan kelompok dalam upaya mencapai tujuannya (Alfitri, 2002; Johnson, 1994). Demikian pula yang dikemukakan oleh Soetrisno (2008) berkaitan dengan kepemimpinan tokoh masyarakat, yaitu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan.

Dahama dan Bhatnagar (1980) membedakan antara pemimpin dan kepemimpinan, yang mengemukakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang secara spontan mempertimbangkan, menentukan, dan mempengaruhi dalam situasi yang spesifik; sedangkan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi individu dalam suatu situasi tertentu. Selanjutnya Carter (Yusuf, 2009) mengidentifikasi bahwa terdapat lima pola dalam mendefinisikan pemimpin, yaitu: pertama, pemimpin adalah seseorang yang menjadi fokus dalam perilaku kelompok; kedua, pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin kelompok yang mengarah ke tujuan kelompok; ketiga, pemimpin adalah seseorang yang dipilih oleh anggota kelompok; keempat, pemimpin merupakan seseorang yang mampu mendemonstrasikan pengaruhnya atas kelompok; kelima, pemimpin adalah seseorang yang terikat pada perilaku

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 1	HALAMAN: 37-48	ISSN:2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
---------------------------	-----------	----------	----------------	---

kepemimpinan. Dengan demikian, pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi dan mengatur perilaku orang lain ke arah pencapaian tujuan.

Upaya memetakan tokoh-tokoh (*stakeholders*) di masyarakat perdesaan tidak lain adalah memetakan para pemimpin masyarakat di perdesaan. Biasanya tokoh masyarakat atau pemimpin lokal (*local leader*) tersebut mewakili kelompok atau institusi tertentu di perdesaan. Salah satu cara atau metode untuk memetakan keberadaan para aktor atau tokoh di masyarakat adalah dengan menentukan terlebih dahulu lembaga pusat (*central*) pemerintahan dari kegiatan masyarakat, yaitu pemerintahan desa, dengan tokohnya kepala desa.

Menentukan, memilih dan memilah mana tokoh-tokoh di dalam masyarakat memerlukan keahlian tersendiri. Pengalaman lapangan akan sangat bermanfaat untuk menentukan dengan cepat siapa saja tokoh masyarakat dalam suatu masyarakat perdesaan. Setidaknya terdapat dua jalur atau cara dalam menentukan tokoh. Pertama dengan jalur formal (resmi), yaitu menelusurinya melalui jalur administrasi pemerintahan secara berjenjang, mulai dari pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, lalu ke rukun warga (RW), ke dukuh atau kampung, hingga Rukun Tetangga (RT). Cara kedua dengan jalur informal, yaitu melalui informasi yang diperoleh dari masyarakat langsung, apakah saat sedang berkumpul di warung kopi, saat ngobrol di lahan persawahan, saat selesai beribadah di mushola atau masjid jami desa, saat berpapasan di jalan, atau situasi dan tempat lain di perdesaan yang suasananya tidak resmi. Keuntungan dengan menggunakan jalur informal, suasananya lebih santai dan lebih akrab, sehingga informasi yang diperoleh umumnya lebih terbuka, bahkan terkadang berlebih. Namun hal ini sangat bergantung pada kemampuan dan pengalaman seseorang dalam berkomunikasi dengan masyarakat desa. Kerugian atau hal yang diwaspadai dari jalur informal adalah kecurigaan dari warga masyarakat terhadap kehadiran orang asing (baru) di wilayahnya. Adapun informasi yang seharusnya dapat diperoleh dengan mudah dan terbuka, menjadi sulit dan tertutup.

Kemudian keuntungan atau kelebihan yang diperoleh dengan menggunakan jalur formal, bahwa proses pemetaan tokoh masyarakat pada suatu daerah memiliki dasar hukum yang jelas, karena telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang. Ijin dan kejelasan tujuan dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya jika ada pihak-pihak yang mempertanyakan legalitas riset (pemetaan sosial). Kejelasan ijin dan landasan hukum riset tentunya membuat tim peneliti merasa lebih tenang dan aman selama proses pengumpulan data di lapangan. Namun demikian, pada sisi lain terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dari jalur formal ini. *Administrative-bureaucratic* selamat mengurus perijinan memunculkan kesan ‘rigiditas’ (kekakuan) dari prosedur yang harus dilalui. Sebagian orang memandang sisi ini secara negative, sehingga banyak yang ‘potong kompas’, tidak mau atau malas untuk melalui jalur tersebut. Kekakuan tersebut berdampak pada proses pengumpulan data di lapangan menjadi kehabisan ‘energi’ dan waktu, karena lamanya proses pengurusan perijinan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah sikap masyarakat lokal. Pada lapisan masyarakat ‘grassroot’ (akar rumput) seringkali memandang ‘nyinyir’ jika sesuatu program berasal dari pusat (*top down*). Sehingga tidak jarang masyarakat memandang kehadiran tim peneliti, yang akan melakukan pemetaan sosial, sebagai bagian dari pemerintah pusat atau lembaga dominan lainnya. Masyarakat agak sedikit tertutup, atau mengambil sikap menutup diri. Akibatnya informasi yang seharusnya dapat diperoleh dengan mudah sesuai tujuan riset melalui sumber-sumber kunci (*key informant*), menjadi terhambat dan atau kalau pun diperoleh informasinya terlalu ‘datar’ tanpa makna. Kondisi ini diperburuk dengan sebagian sikap masyarakat yang cenderung ‘meminta bantuan’ (akibat dari program-program sebelumnya yang *top down*). Siapapun orang asing (bukan warga setempat) khususnya dari pemerintahan atau nampak memiliki kelebihan yang hadir mendatangi wilayah perdesaan, maka masyarakatnya biasanya mengharapkan bantuan dengan mengemukakan berbagai kekurangan yang dihadapi di daerahnya. Situasi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri yang harus



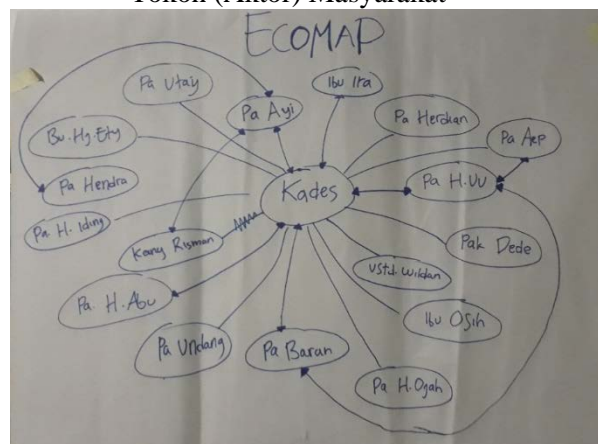
dihadapi oleh tim peneliti lapangan. Para peneliti yang berpengalaman umumnya sudah memaklumi dan paham terhadap situasi tersebut. Sedangkan, bagi peneliti pemula diperlukan latihan dan *supervisi* dari peneliti berpengalaman.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka jalur mana kiranya yang harus ditempuh dalam rangka riset memetakan tokoh masyarakat dalam perkembangan saat ini, kedua jalur baik informal maupun formal, sebaiknya dapat ditempuh dan dipadukan. Jalur mana yang harus ditempuh terlebih dahulu, akan bergantung pada kondisi lapangan dan masyarakatnya. Bisa saja jalur informal ditempuh terlebih dahulu, khususnya dalam membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat setempat. Setelah terbangun kepercayaan dan relasi yang 'hangat' dengan masyarakat setempat, lalu sambia riset berjalan, prosedur ijin dapat ditempuh. Atau jalur formal ditempuh terlebih dahulu, dan sejalan dengan itu komunikasi dengan masyarakat dapat dibangun seiring dengan pengumpulan informasi tokoh masyarakat dan data lainnya. Kedua jalur tersebut bukan pilihan yang mana yang harus ditempuh, tetapi keduanya dapat dipadukan dan saling dukung dalam pengumpulan data di lapangan.

Dari kedua jalur riset tersebut, setidaknya terdapat informasi awal mengenai siapa saja tokoh-tokoh masyarakat yang ada di perdesaan. Langkah selanjutnya, yaitu melakukan diskusi kelompok dengan para anggota masyarakat terbatas, untuk dapat menentukan para aktor lainnya di masyarakat. Dalam informasi awal para anggota kelompok tersebut biasanya merupakan tokoh-tokoh kunci dalam masyarakat, tetapi ini masih bersifat sementara. Dengan demikian diperlukan diskusi bersama anggota kelompok untuk menentukan beberapa tokoh lain dalam masyarakat yang mungkin belum terungkap. Beragam cara dan teknik untuk memetakan tokoh masyarakat di suatu wilayah secara visual, sebagaimana terlihat dalam gambar 1. Dalam gambar 1 memperlihatkan contoh pemanfaatan teknik pemetaan tokoh di tahap awal dengan melakukan pemetaan lingkungan (*ecomap*). Dalam gambar 1, nampak

terlihat siapa saja tokoh yang seringkali membangun komunikasi dengan Kepala Desa (Kades).

Gambar 1 Pemetaan Lingkungan (*Ecomap*) Para Tokoh (Aktor) Masyarakat



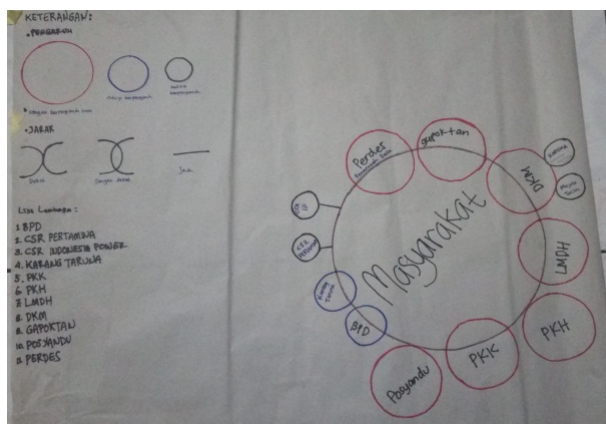
Sumber: Pusdi CSR, KS &PpM 2018

Dalam gambar 1, terpetakan komunikasi yang terbangun antara tokoh masyarakat dengan kepala desa, yang hal ini merupakan indikasi bahwa mereka memiliki 'pengaruh' atau 'keistimewaan' tertentu dalam pandangan anggota masyarakat. Gambaran peta tersebut merupakan jaringan berpotensi positif, khususnya dalam mengidentifikasi saluran-saluran komunikasi pembangunan desa. Komunikasi pembangunan desa yang dimaksud dalam hal ini adalah membicarakan dan mendiskusikan segala hal yang berkaitan dengan upaya mengatasi persoalan-persoalan desa, serta membangun desa dengan segala potensi yang dimiliki dalam wilayah desa, dan jaringannya ke luar desa. Termasuk di dalamnya bagaimana keterlibatan pihak perusahaan melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) dalam membangun desa yang sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya.

Berbicara tokoh masyarakat di perdesaan maka seringkali tidak terlepas dengan organisasi atau lembaga sosial yang mewadahnya. Namun demikian tidak semua tokoh masyarakat harus bernaung atau berlandaskan kelembagaan. Organisasi atau lembaga sosial di perdesaan bisa saja bersifat formal atau juga informal. Dalam gambar 2 memperlihatkan pemetaan organisasi sosial di perdesaan melalui jaring diagram *venn*.



Gambar 2 Diagram Venn Pemetaan Organisasi Sosial di Perdesaan



Sumber: Pusdi CSR, KS &PpM 2018

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pemetaan tokoh masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada proses pengembangan masyarakat, dimana peran serta (partisipasi) masyarakat sudah dilibatkan dari sejak awal. Masyarakat difasilitasi untuk mengetahui dan menyadari akan potensi dan sumber-sumber, serta persoalan yang dihadapinya. Demikian pula dengan kegiatan CSR pada industri ekstraktif yang ditujukan bagi masyarakat. Gambar 1 dan gambar 2 merupakan contoh dari hasil memetakan bersama dari warga masyarakat. Gambar tersebut bukan mempersoalkan tentang bagus atau tidaknya gambar, tetapi kedua gambar tersebut memberi makna banyak hal, yaitu

1. Membangun kebersamaan antar warga masyarakat dalam membuat kegiatan bersama;
2. Menghormati dan menghargai nilai-nilai, norma, adat, pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat.
3. Membangun kesadaran dan pemahaman bersama, tidak parsial tentang potensi masyarakatnya sendiri;
4. Melatihkan keterampilan sederhana, contohnya dalam memetakan tokoh;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat;
6. Membangun rasa kepemilikan bersama (*common belongingness*) atas program yang dibuat bersama;
7. Memelihara kesinambungan program dan kegiatan; dan

8. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebersamaan; dan banyak hal positif lainnya.

Kesemua makna dan nilai-nilai partisipatif tersebut tidak sesederhana diucapkan dan diperoleh. Dalam konteks kegiatan *corporate social responsibility*, maka perusahaan perlu membangun sikap kesungguhan, kesabaran dan bekerja optimal dalam rangka pengembangan masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan, dan besarnya dana CSR itu sendiri tidaklah cukup untuk memperoleh makna tersebut. Upaya perusahaan melakukan kegiatan pengembangan masyarakat yang partisipatif sebagai wujud program CSR, dapat dimulaisejak tahap perencanaan kegiatan.

Perusahaan-perusahaan seringkali terjebak dengan penilaian pemeringkatan, sehingga segala daya dan upaya dilakukan untuk menunjukkan bahwa perusahaannya layak memperoleh peringkat tertinggi. Beberapa kriteria penilaian dikeluarkan dari instansi yang berbeda, misalkan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang merupakan kriteria penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kemudian terdapat ISO 14000 series yang merupakan seperangkat standar internasional bidang manajemen lingkungan yang dimaksudkan untuk membantu organisasi di seluruh dunia dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungannya. Perumusan standar ISO 14000 series diprakarsai dunia usaha sebagai kontribusi terhadap pencapaian Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992.

Berbagai kriteria penilaian tersebut merupakan hal yang sangat baik, sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan dan kelestarian lingkungan hidup. Namun seringkali perusahaan berupaya memenuhi kriteria tersebut hanya sekedar secara administratif dan popularitas saja, Mereka berupaya keras memenuhi kriteria tersebut, sehingga terkadang melupakan sasaran jangka panjang serta *stakeholder* penting dari kriteria penilaian tersebut.

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 1	HALAMAN: 37-48	ISSN:2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
---------------------------	-----------	----------	----------------	---

## PENUTUP

Pemetaan sosial, yang salah satu kegiatannya adalah memetakan tokoh masyarakat merupakan langkah awal krusial yang harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, penuh kesabaran dan bekerja dengan optimal bersama-sama masyarakat. Jika dalam suatu masyarakat partisipasi belum muncul, maka partisipasi harus dibangun, ditumbuhkan, dan dikembangkan untuk selanjutnya dapat dipelihara melalui kegiatan-kegiatan mandiri dan berkesinambungan. Perusahaan, khususnya industri ekstraktif, sudah semestinya mengedepankan kepentingan masyarakat setempat sebagai pemangku kepentingan utama dan terpenting dalam kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan (TJSP) atau *corporate social responsibility (CSR)*.

Pihak perusahaan harus mampu mengidentifikasi para tokoh masyarakat, khususnya di perdesaan, yang berguna dalam mengakselerasi berbagai kegiatan yang ditujukan bagi masyarakat. Para tokoh masyarakat yang merupakan pemimpin lokal dapat berperan dalam mendorong (*motivator*), menggerakkan (*mobilisator*), dan menyelenggarakan (*facilitator*) kegiatan, serta mengakui dan memastikan (*legitimator*) kegiatan yang terselenggara. Selanjutnya perusahaan harus mampu membangun relasi dengan masyarakat, melalui para tokohnya. Salah satu kesungguhan pihak perusahaan selain memenuhi kriteria penilaian yang ada adalah dengan segera menyiapkan sumber daya manusia yang memang mumpuni dalam bidang pengembangan masyarakat dan CSR. dalam melaksanakan kegiatan

Kegiatan pengembangan masyarakat atau *community development (CD)* juga CSR sangat kental pelibatan masyarakat (partisipatif), hal ini tidak lain dalam upaya menjaga kemandirian (*independence*) masyarakat, masyarakat yang berdaya (*empowered*), serta memastikan kesinambungan (*sustainability*) suatu program dapat terpelihara dengan baik. Dalam menjalankan program-program CSR, pihak perusahaan dan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri, sehingga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, seperti pemerintah, media, akademisi

(perguruan tinggi), dalam melaksanakan kegiatan CSR melalui kegiatan pengembangan masyarakat atau *community development*).

## PUSTAKA

- Agustinus. W. (2016) Kerangka Ekonomo Makro Daerah Kota Bitung di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. *Sosio-humaniora*, 18, 185-190.
- Ahmad Suhendi. Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Informasi Vol. 18, No. 02, Tahun 2013*, 105 - 116)
- Albarracin, Johnson, & Zanna. (2005). *The handbook of attitudes*. New Jersey: Erlbaum.
- Alfitri. 2002. Kepemimpinan dan Struktur Kekuasaan Lokal dalam pembangunan [Tesis]. Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- American Psychological Association. (2010). *Publication manual of the American Psychological Association*. Sixth edition. Washington D.C.: American Psychological Association
- Amanah. 2009. Pengembangan Kelembagaan komunikasi inovasi kelompok tani Hortikultura dataran rendah dalam meningkatkan daya saing. PSP3. LPPM. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Antlov H. 2003. Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal. Yogyakarta (ID): Lappera Pustaka Utama
- Awang SA. 2004. Kemampuan dan Peranan KSM. Proses Keswadayaan (Studi kasus desa hutan dalam Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal. Yogyakarta (ID): Aditya Media.
- Azwar, S. (2007). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Rudito, Arief Budimanta, Adi Prasetijo. 2004. *Corporate social responsibility : jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini / [penulis,. Jakarta : Indonesia Center for Sustainable Development, 2004 vii, 188 p. ; 21 cm*

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 1	HALAMAN: 37-48	ISSN:2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
---------------------------	-----------	----------	----------------	---

- Bryant, Coralie, White L. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara berkembang*. Jakarta (ID): LP3ES.
- Dahama OP dan Batnagar OP. 1980. *Education and Communication for Development*. New Delhi: Oxford dan IBH Publishing Co.
- Desiningrum, D. R. (2011). Future time perspective, goal orientation, and subjective well being in elderly. *The Padjadjaran International Conference on Psychology* (pp.17-23). Bandung, Indonesia: Faculty of Psychology, Padjadjaran University.
- Frynas, JG. 2009. *Beyond Corporate Social Responsibility, Oil Multinationals and Social Challenges*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Helda Ibrahim1, Majdah Zain2, Tamzil Ibrahim2 Peranan Pemimpin Lokal dalam Meningkatkan Kemampuan Kelompok (Kasus Kelompok Tani di Desa Pulo Kencana Kecamatan Pontang Kabupaten Serang); *Jurnal Penyuluhan*, Maret 2014 Vol. 10 No. 1; 25-34
- Hemhill JK, Coons AE. 1957. *Development of the Leader Behavior Description Questionnaire*. Colombus (UK): Ohio State University
- Heriyawati Y. 2007. *Upacara Bubur Suro: Artefak Masyarakat Ladang-Sawah*. Bandung (ID): STSI Press.
- Johnson DW. 1994. *Joining Together: Group Theory dan Group Skills*. Ed. ke 3. Englewood Cliffs: Prentice Halls.
- Kartodirdjo. 2007. *Faktor-faktor endogen masyarakat pedesaan: Kepemimpinan, Kaderisasi, Komunikasi dan Lembaga-lembaga P3PK UGM*. Yogyakarta
- Kartono, Kartini. 2004 *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta (ID): Raja Grafindo Persada.
- Liow RM, Laloma A, Welly. 2015. Peran pemimpin informal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Malola. *J Adm Publik*. 3(31): 1-9. [diunduh 2016 Apr 10]. Tersedia pada: <http://ejournal.unsrat.ac.id/>
- Lunsford, A., & Ede, L. (2009). *Child education: Perspective on teaching activities*. Carbondale: Illinois University Press.
- Mahayana W. 2013. Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. *J Ilmu Pemerintahan*. 1(1): 400-414. [diunduh 2016 Jun 1]. Tersedia pada: [ejournal.ip.fisip-unmul.org](http://ejournal.ip.fisip-unmul.org)
- Margono et al. 2014. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai pada kantor Camat Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. 2(1): 807-819. [diunduh 2016 Sep 18]. Tersedia pada: [http://ar.mian.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/01/journal\\_persen20ganjil\\_persen20ramli\\_persen20](http://ar.mian.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/01/journal_persen20ganjil_persen20ramli_persen20)
- Mubyarto. 2004. Reformasi Agraria: Menuju Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 1(8) : 20-25.
- Nugrahanto, W. & Adyawardhina, R. (2018). Demokrasi Dalam Sejarah Militer Indonesia; *Kajian Histois Tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama Tahun 1945*. *Sosiohumaniora*, 20, (2), 78-85.doi: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i1.14368>
- Pranowo DH. 2005 *Masyarakat Desa: Tinjauan Sosiologi*. Surabaya (ID): Bina Ilmu Surabaya.
- Pratama, A. G. (2009). Kontribusi kesejahteraan subjektif pada religiusitas Islam, persepsi tentang penyakit, dan perilaku menjaga kesehatan diri dalam model perilaku memelihara kesehatan: Suatu upaya menemukan model perilaku memelihara kesehatan dengan taraf keccokan optimal pada penderita HIV+. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 1	HALAMAN: 37-48	ISSN:2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
---------------------------	-----------	----------	----------------	---

- Raharjo, ST. 2015. CSR: Relasi Dinamis antara Perusahaan dengan Masyarakat Lokal. Unpad Press: Bandung.
- Raharjo, ST. 2015. Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Melalui Keteladanan Nasional dan Keluarga. *Share: Social Work Journal*, Vol 5 No 2, 106-117.
- Shintadewi, E.A & Sumartias S. (2017). Promosi Kesehatan Hiv-Aids dan Stigma Terhadap Pengguna Narkoba Suntik (Penasun) di Kabupaten Sumedang. *Sosiohumaniora*, 19, (2), 129-140.
- Slamet. 2008. Kelompok: Kumpulan Bahan Bacaan. Edisi Ketiga. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Siwalette JD. 2005. Peran tokoh adat dalam perubahan struktur pemerintahan desa [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Soetrisno. 2008. Kelompok sebagai suatu strategi Pembangunan Pedesaan: Suatu pemikiran Kritis “Makalah tidak diterbitkan. XX (tidak direview?!)
- Suradisaatra, K., Herlina Tarigan dan Erma Suryani. 2009. *Indigenous Community Empowerment in Poverty Alleviation*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Food and Agricultural Organization-Regional Asia and Pacific Office.
- Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Jakarta (ID): Bina Rena Pariwisata
- Tanto, Djoko S. (2012). *Revitalisasi Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Stabilitas Politik*. [http://djsutanto.blogspot.com/2012\\_06\\_01\\_archive.html](http://djsutanto.blogspot.com/2012_06_01_archive.html).
- Uphord PQ. 1987 *Local Leadership and Programme Implementation in Indonesia*. Amsterdam: Free University Press.
- Urpon R. 2015. Hubungan peran pemimpin lokal dengan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program alokasi dana desa (ADD). [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Valera JB et al. 1987. *Extension Delivery Systems: An Introduction*. Manila: Island Publishing House. Inc.
- Willig, C. (2008). *Introducing qualitative research in psychology: adventures in theory and method*. (2nd ed.). London: McGraw-Hill Open University Press
- Yanti R. 2004. Peran tokoh adat dalam mengkomunikasikan usaha pengelolaan dan pelestarian hutan (kasus hutan adat Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat) [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Yusuf Y. 2009. *Dinamika Kelompok: Kerangka Studi dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Bandung (ID): Armico.